

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Penelitian Terdahulu

Menurut Mailindra (2017) menjelaskan bahwa keragaman nilai belanja di Provinsi Jambi melalui standar deviasinya menunjukkan angka yang sangat fluktuatif. Pada hasil regresi menunjukkan bahwa nilai keragaman belanja yang jumlahnya fluktuatif tersebut menimbulkan ketimpangan dengan nilai koefisien $2,591E-07$. Angka tersebut memiliki arti apabila belanja naik Rp 1 juta maka ketimpangan naik $2,591E-07$. Pada nilai Indeks Williamson menampilkan bahwa tingkat ketimpangan di Provinsi Jambi tergolong sedang dengan rata-rata Indeks Williamson 0,3.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Zulfan, dkk (2003) menjelaskan bahwa ketimpangan yang terjadi pun sejalan dengan beberapa aspek sosial dan sumber daya alam yang tersedia pada daerah tersebut. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa ketimpangan yang terjadi bukan hanya semata-mata disebabkan oleh adanya perbedaan sumber daya alam dan ekonomi semata, melainkan aspek sosial juga berperan di dalamnya. Beberapa daerah seperti Aceh dan Papua yang memiliki sumber daya alam yang melimpah tidak menutup kemungkinan untuk mengalami ketimpangan dengan provinsi yang ada pada regionalnya. Konflik antar suku maupun pemerintah menyebabkan tingkat kemiskinan, kesehatan, dan pembangunan manusia

yang terhambat menyebabkan sumber daya yang tersedia tidak dapat diolah secara maksimal.

Pada penelitian tersebut ditemukan bahwa koefisien ketimpangan Gini di mana yang memiliki beberapa indikator seperti: pengeluaran rumah tangga (berdasarkan pada pendekatan konsumsi), pendidikan, kesehatan dan beberapa faktor yang tergolong dalam Indeks Pembangunan Manusia menjelaskan bahwa Indeks Gini yang dimiliki Indonesia tergolong rendah. Dari periode tahun 1964-2002 hanya mengalami peningkatan dari 0,31-0,36, di mana itu sangat rendah apabila dibandingkan dengan beberapa negara lain di Asia Tenggara. Hal tersebut pun didukung dengan penelitian Aidar (2003) mencatat bahwa pada regional Aceh sendiri terdapat ketimpangan yang relatif tinggi di dalamnya. Hal tersebut ditemukan pada Index Theil pada beberapa daerah di Aceh yang menyentuh angka 1 yang artinya disparitas pendapatan yang terjadi antardaerah di Aceh relatif tinggi.

Pada negara Tiongkok, Sun (2018) menjelaskan bahwa terdapat ketimpangan yang terjadi pada pendapatan di daerah perkotaan dan pedesaan Tiongkok (tidak termasuk Guangdong, Sahnghai, Tianjian). Ketimpangan tersebut terjadi karena proses ekspor pada perusahaan asing di Tiongkok yang terpusat melakukan pembaharuan teknologi. Disamping itu Sun menjelaskan tingkat urban ratio yang terpusat di beberapa provinsi di Tiongkok juga berakibat pada tingkat ketimpangan yang terus terjadi.

Dalam pembangunan daerah, pada kenyataannya ketimpangan pendapatan antar daerah di Indonesia tidak dapat dihindari keberadaannya. Menurut Delis (2009)

pada data analisis deskriptif yang dilakukan telah terjadi peningkatan ketimpangan antar provinsi di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitiannya dapat dinyatakan bahwa nilai Index Wiliamson pada tahun 1990 pada titik 0,491 dan terus melebar hingga tahun 2000 yang menyentuh angka 0,66. Hal ini justru lebih kecil ketimbang saat krisis terjadi. Pada tahun 1997, puncak ketimpangan pendapatan berada pada 0,69. Hal ini dikarenakan krisis mulai melanda Indonesia yang menyebabkan produk domestik bruto di Indonesia turun sehingga pendapatan perkapita masyarakat juga relatif turun dan pada akhirnya memperkeruh tingkat kesenjangan ekonomi yang ada di Indonesia.

Berbeda dengan hal tersebut, Soseco (2010) peneliti menggunakan metode deskriptif. Soseco (2010) menjelaskan bahwa data Indeks Theil yang ada sehingga menukan hasil bahwa tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang ada di Indonesia turun. Penelitian tersebut mengasumsikan bahwa Indonesia terbagi atas 6 wilayah yang terdiri atas: Wilayah Sumatera, Wilayah Jawa, Wilayah Bali-Nusa Tenggara, Wilayah Kalimantan, Wilayah Sulawesi dan Wilayah Maluku-Papua. Pada penelitian tersebut, disebutkan bahwa periode penelitian terjadi pada tahun 1996-2006. Ketimpangan yang ada pada penelitian tersebut dibagi atas dua kawasan utama besar yaitu Barat dan Timur.

Pada data, tercatat kesenjangan pendapatan yang terjadi di Indonesia pada Indeks Theil cenderung menurun. Pada kedua kawasan besar yaitu Indonesia bagian Barat dan Timur didapat nilai rata-rata Indeks Theil yang ada di Indonesia pada tahun 1996-2006 terdapat pada titik 0,16. Ketimpangan yang terjadi diakibatkan oleh 74%

dari ketimpangan yang terjadi didalam kawasan antar provinsi, sedangkan 26% sisanya disebabkan oleh antar provinsi. Adanya temuan ketimpangan antar provinsi pada kawasan diakibatkan oleh konvergensi pendapatan yang terjadi pada provinsi-provinsi yang mampu meningkatkan tingkat pendapatan perkapitanya.

Khairunnisa (2016) menjelaskan pada analisis *Klassen Typologi* menunjukkan pada periode 2001-2005 dan 2006-2010 telah membentuk pola baru pembangunan selama periode-periode tersebut. Hal tersebut pun sejalan dengan Indeks Wiliamson yang menunjukkan bahwa terdapat tujuh kecamatan yang memiliki nilai indeks yang menurun dan 14 kecamatan yang memiliki nilai indeks yang naik dengan nilai Indeks Wiliamson antar kecamatan yang tergolong rendah dan memiliki nilai rata-rata sebesar 0.16994. Namun hal ini tidak dapat menutup kemungkinan dalam kenaikan ketimpangan pembangunan ekonomi yang terus meningkat antar kecamatannya yang dikarenakan nilai Indeks Wiliamson yang relatif naik.

Wadji (2011) Indeks Entropi Theil menunjukkan bahwa komposisi penyebab ketimpangan yang ada di Sulawesi Selatan disumbangkan oleh ketimpangan yang terjadi pada kabupaten atau kota yang ada. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Theil dalam daerah lebih besar ketimbang nilai Theil antar daerah. Nilai Diversitas Entropi juga menunjukkan bahwa penyebab ketimpangan tersebut disebabkan oleh karena kurang meratanya sektor-sektor ekonomi serta kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan ketimpangan dalam kabupaten atau kota dan menumbangkan ketimpangan tersebut untuk tingkat Sulawesi Selatan.

Nugroho (2014) menjelaskan pada Tipologi Klassen melalui nilai rata-rata pertumbuhan ekonominya dapat menggambarkan bahwa terdapat tujuh kecamatan yang memiliki daya tumbuh cepat, lalu terdapat empat kecamatan dengan daya tumbuh cepat namun tertekan. Setelahnya terdapat satu kecamatan yang berkembang cepat namun masih terdapat 15 kecamatan yang masih tertinggal.

Hal ini menggambarkan bahwa adanya ketimpangan ekonomi yang terjadi antar kecamatan dalam Kabupaten Banyumas. Begitupun jika diujikan menggunakan Indeks Wiliamson. Melalui dasar perhitungan dengan memperhitungkan antara PDRB per kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per kecamatan, maka dapat diambil data bahwa nilai ketidakmerataan masih relatif tinggi. Nilai Indeks Wiliamson yang menyentuh angka rata-rata lebih dari 0.550424 mengimplikasikan bahwa terdapat ketimpangan yang relatif tinggi antar wilayah.

Hal tersebut pun memiliki korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Banyumas apabila menggunakan Uji Korelasi Pearson. Uji Korelasi Pearson menjelaskan jika pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan maka ketimpangan pendapatan akan terus melebar, hal tersebut berlaku sebaliknya. Hal itu pun berlaku pada Uji Granger yang mengetahui ada hubungan antara Indeks Wiliamson dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengindikasikan apabila Indeks Wiliamson naik maka pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Banyumas akan relatif naik.

Vu (2016) menggunakan Indeks Theil, Indeks Koefisien Gini, dan Koefisien variabel tertimbang diantara kedua indeks tersebut. Pada pembahasannya dengan

menggunakan beberapa variabel tersebut dapat mengambil kesimpulan bahwa adanya penurunan tingkat ketimpangan pendapatan perkapita pada setiap sub-grup. Penemuan tersebut terjadi pada tahun 1990-1994, dan beberapa provinsi disamping Kota Ho Chi Minh tetapi pada sub-periode 2004-2011, dimana semua provinsi mengindikasikan terpusat pada periode tersebut. Pada penelitian tersebut ditemukan pada 5 sub-grup tersebut terdapat beberapa provinsi termiskin yang cenderung berlokasi secara geografis dan ekonomi terpencil di Vietnam.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Alat	Hasil penelitian
1.	Delis (2009)	<ul style="list-style-type: none"> • Index Williamson 	Analisis deskriptif kuantitatif	Tingkat ketimpangan yang ada di Indonesia terus melebar dari tahun 1990 hingga tahun 2000.
2.	Zulfan, dkk (2003)	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Williamson • Indeks Gini • Index Entropi Theil • GRDP 	Analisis deskriptif kuantitatif	Ketimpangan Indeks Gini tahun 1993-1999 memiliki rata-rata 0.41 dan ketimpangan Indeks Willimson 1.07.
3.	Aidar (2003)	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB per kapita • Indeks Entropi Theil 	Regresi data <i>time series</i>	Pendapatan per kapita memiliki hubungan positif terhadap ketimpangan pembangunan.

4.	Soseco (2010)	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Entropi Theil 	Analisis deskriptif kuantitatif	Ketimpangan yang terjadi antar kawasan menyumbang 74% tingkat ketimpangan dan 26% sisanya disumbangkan oleh ketimpangan antar provinsi dalam kawasan.
5.	Khairunnisa (2016)	<ul style="list-style-type: none"> Tipologi Klassen Index Williamson 	Analisis deskriptif kuantitatif	Indeks Williamson memiliki nilai rata-rata indeks sebesar 0.16994.
6.	Wadji (2011)	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Williamson Indeks Theil Pertumbuhan PDRB Rasio Belanja provinsi 	Regresi linier berganda	Ketimpangan yang terjadi Belanja Pemerintah relatif mengurangi ketimpangan. Dan tingkat diversitas Entropy antar wilayah masih tergolong tinggi karena nilai rata-rata entropi 0.78 atau mendekati 1
7.	Nugroho (2014)	<ul style="list-style-type: none"> Pertumbuhan PDRB Tipologi Klassen Indeks Williamson 	Analisis Trend (<i>time series</i>)	Trend pertumbuhan ekonomi selama tahun 2002 hingga 2011 mengalami kenaikan setiap

				tahun.
8.	Mailindra (2017)	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks williamson • Anggaran belanja pemerintah 	Analisis data trend (<i>time series</i>)	Terdapat hubungan positif antara variasi belanja pemerintah dan ketimpangan pembangunan.
9.	Vu (2016)	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Wiliamson • Indeks Theil • Entropi • Koefisien gini • Investasi Langsung Asing • Investasi Dalam Negeri 	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis regresi data panel • Analisis data kuantitatif 	Investasi langsung asing dan dalam negeri memiliki hubungan positif terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah
10.	Sun (2018)	<ul style="list-style-type: none"> • Ketimpangan pendapatan penduduk desa dan kota • Tingkat ekspor • Faktor Z seperti investasi dan kebijakan pemerintah 	Analisis data panel dinamis	Tingkat pendapatan penduduk diketahui bahwa tingkat ketimpangan dari pendapatan penduduk kota dan desa.

Peneliti menggunakan rujukan utama pada penelitian Mailindra (2017) dengan perbedaan pada periode penelitian. Pada penelitian ini terdapat tambahan variabel yang merujuk pada penelitian Zulfan (2003) dan Sun (2018) yaitu PDRB dan rasio penduduk kota.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2013:9), pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan dari perkembangan dari kegiatan dalam perekonomian yang dapat menyebabkan

meningkatnya jumlah barang dan jasa dalam masyarakat. Dalam pertumbuhan ekonomi menjadi pandangan permasalahan ekonomi dalam jangka waktu yang panjang.

Terdapat beberapa faktor yang dapat menambah kapasitas produksi barang dan jasa ini. Pertama, penambahan faktor-faktor produksi seperti bahan baku dan jumlah karyawan baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang tersedia sehingga jumlah produksi dapat terus meningkat. Kedua, dalam meningkatkan kapasitas produksinya, modal melalui tingkat investasi menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan kapasitas produksi sehingga jumlah produksi dapat ditingkatkan. Teknologi yang terus berkembang dapat menjadi salah satu faktor selain menambah tingkat produksi, teknologi dapat mengambil andil dalam efisiensi dalam penggunaan faktor produksi yang tersedia.

Dalam kegiatan ekonomi yang sebenarnya, sangat sukar dalam menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara apabila dilihat dari tingkat produktifitasnya. Oleh karena itu, dalam pengukuran tingkat pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional yang dicapai pada beberapa periode menjadi ukuran yang digunakan dalam penentuan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara.

2.2 Ketimpangan dalam Pembangunan Ekonomi

Menurut Sjarizal (2008:104) ketimpangan antar daerah terjadi dikarenakan adanya perbedaan kondisi sumberdaya alam dan demografi. Hal ini menyebabkan kegiatan ekonomi pada masing-masing wilayah terdapat perbedaan. Aspek ini memiliki implikasi terhadap perbedaan tingkat kesejahteraan antar wilayah sehingga

ketimpangan pembangunan wilayah terjadi secara signifikan. Oleh karena itu, formulasi dalam penentuan kebijakan pembangunan oleh pemerintah secara teoritis mengacu pada tingkat ketimpangan yang terjadi.

Ilmuan Neo-Klasik, Douglas C. North dalam Teori Pertumbuhan Neo-klasik menjelaskan hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di dalamnya. Teori ini sering disebut Hipotesa Neo-Klasik. Menurut Hipotesa Neo-klasik pada proses awal pembangunan suatu negara cenderung meningkatkan ketimpangan pembangunan antar wilayah di dalamnya proses ini akan terjadi terus-menerus hingga mencapai suatu titik puncak. Dengan hal ini dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa negara-negara yang sedang berkembang akan memiliki ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara telah maju. Pada negara maju tersebut kurva ketimpangan pembangunan memiliki bentuk seperti U terbalik.

Terdapat alasan yang menyebabkan negara sedang berkembang mengalami ketimpangan antar wilayah yaitu peluang pembangunan pada umumnya dimanfaatkan oleh wilayah yang memiliki kondisi pembangunan yang sudah baik seperti sarana, prasarana serta sumberdaya manusia yang berkualitas baik dan memiliki sumber daya alam yang memadai. Sebaliknya, pada daerah-daerah yang terbelakang dan tidak dapat memanfaatkan peluang-peluang pembangunan dikarenakan perbedaan sumber daya alam maupun perbedaan sumberdaya manusia yang ada menyebabkan keterbatasan pembangunan di wilayah terbelakang tersebut. Hal ini membuat wilayah

yang memiliki peluang tersebut akan semakin maju sedangkan wilayah yang terbelakang tetap keadaan awalnya.

Berbeda dengan negara yang telah maju pada umumnya kondisi daerah telah lebih baik dari segi sarana dan prasarana maupun kualitas sumberdaya manusianya. Disamping itu negara-negara maju tidak memiliki hambatan-hambatan baik dari segi budaya maupun sosial sehingga proses pembangunan tidak memiliki hambatan sama sekali. Dengan demikian pembangunan antar daerah jauh akan lebih merata ketimbang negara yang sedang berkembang. Ekonom lain menguji Teori Ekonomi Pertumbuhan Neo-klasik ini. Jeffrey G. Williamson menguji Teori Ekonomi Pertumbuhan Neo-Klasik melalui uji data time series maupun cross-section. Hasil menunjukkan bahwa Hipotesa Neo-Klasik memiliki formulasi secara teoritis maupun bukti secara empirik. Olehkarena itu, setiap awal proses pembangunan tidak selamanya mengurangi tingkat ketimpangan yang ada melainkan pada tahap permulaan justru menciptakan ketimpangan.

2.2.3.1 Ukuran pada Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah

Terdapat beberapa cara dalam menentukan tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah. Ukuran dari ketimpangan tersebut dapat digunakan sebagai acuan maupun visi bagi pemerintah daerah untuk dapat menentukan kebijakan pembangunan pada daerah atau wilayah tersebut. Terdapat dua indeks yang sering digunakan dalam penelitian antara lain:

A. Indeks Williamson

Dalam penentuan ukuran ketimpangan pembangunan antar wilayah pertama kali ialah williamson indeks di mana studi ini dilakukan pada tahun 1966 oleh Jeffrey G. Wiliamson. Secara statistik indeks ini sebenarnya adalah coefficient of variation yang secara lazim digunakan untuk mengukur suatu perbedaan. Williamson menggunakan teknik ini dalam mengukur ketimpangan pembangunan antar daerah. Indeks ini memiliki kelemahan di mana memiliki tingkat sensitifitas tinggi terhadap definisi wilayah yang digunakan pada perhitungan. Walaupun demikian Indeks ini dinilai cukup lazim untuk digunakan dalam mengukur ketimpangan antar wilayah. Williamson Index menggunakan data PDRB per kapita sebagai data dasar. Hal ini digunakan untuk menghitung tingkat pembangunan antar wilayah dan tingkat kemakmuran antar kelompok dalamnya.

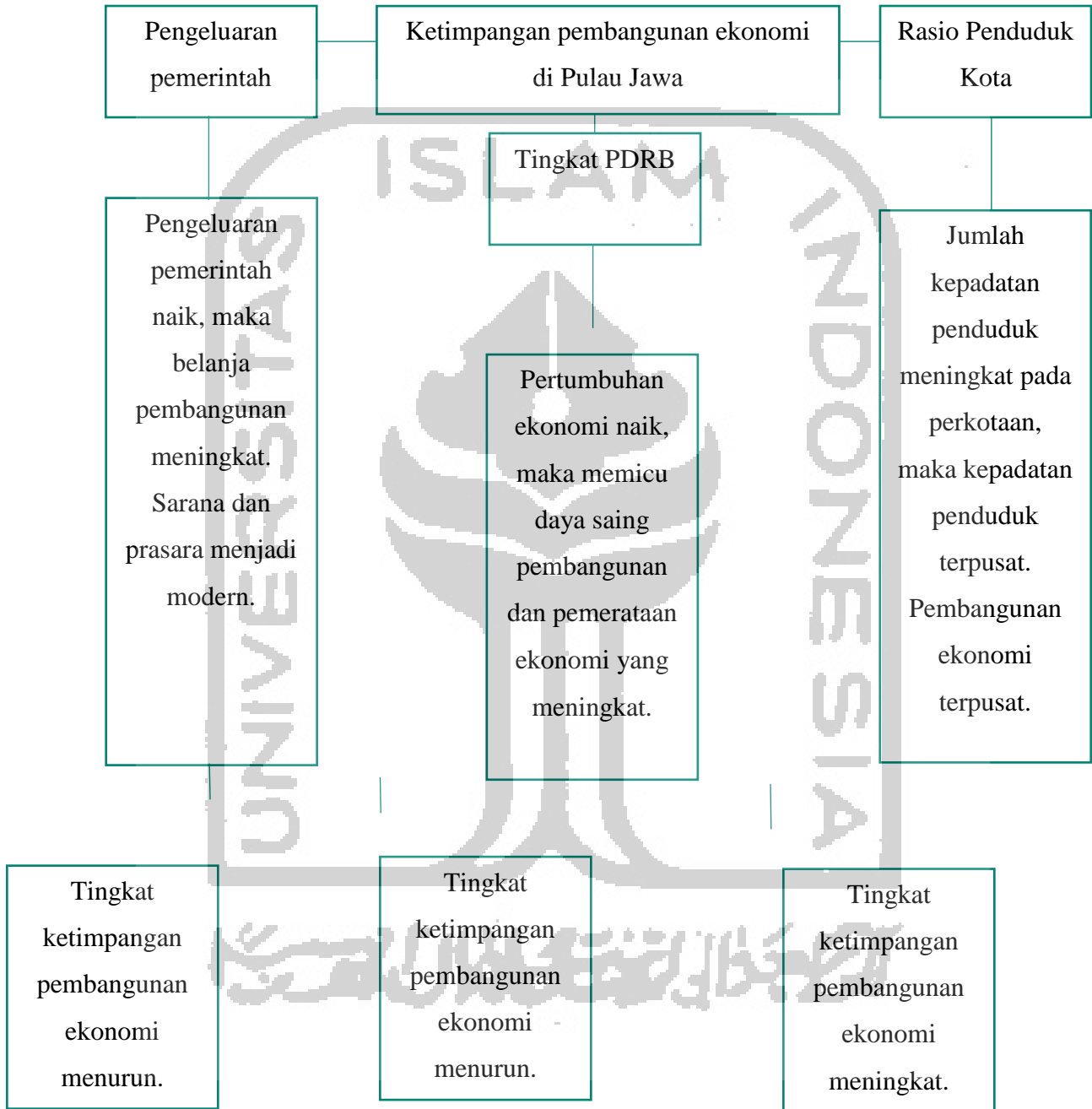
B. Indeks Theil

Indeks lain yang biasanya digunakan oleh peneliti dalam mengukur tingkat ketimpangan antar wilayah adalah Theil Index. Sama dengan Indeks Williamson dalam perhitungannya Indeks Theil menggunakan PDRB per kapita sebagai satuan hitung dan jumlah penduduk. Indeks Theil memiliki beberapa kelebihan dalam penggunaannya. Yang pertama, cakupan analisa dapat lebih luas. Hal ini dikarenakan dalam penggunaan Indeks Theil digunakan untuk menghitung ketimpangan dalam daerah maupun antar daerah sekaligus. Yang kedua, penggunaan indeks ini dapat menghitung besar kontribusi pembangunan suatu wilayah secara keseluruhan sehingga dapat memberikan visi pada kebijakan pembangunan daerah.

2.3 Kerangka pemikiran

Berdasarkan hipotesa penelitian dan studi pustaka yang dilakukan maka dibentuk beberapa kerangka pemikiran. Pada kerangka pemikiran dijelaskan bagaimana suatu variabel dependen dapat mempengaruhi variabel independen. Berikut merupakan kerangka pemikiran yang dibentuk peneliti dari studinya, yaitu:





Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Setelah melihat kajian pustaka dan landasan teori sehingga membentuk sebuah kerangka pemikiran, maka dalam penelitian ini analisis menggunakan hipotesis yang merupakan dugaan sementara sebagai berikut:

- a. Pengeluaran pemerintah diduga memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan antar provinsi di Pulau Jawa.
- b. PDRB diduga memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan antar provinsi di Pulau Jawa.
- c. Rasio penduduk kota diduga memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan antar provinsi di Pulau Jawa.